

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Bab V, selanjutnya ditetapkan Strategi dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah. Sebelum menentukan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015, perlu memperhatikan amanat RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025.

7.1.1. Amanat RPJM Nasional Tahun 2010-2014

RPJM Nasional telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN tahun 2010 - 2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Agar dapat memenuhi amanat ini, RPJMN tahun 2010 - 2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

1. **Buku I** memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN."
2. **Buku II** memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005 - 2025 dengan tema: "MEMPERKUAT SINERGI ANTAR BIDANG PEMBANGUNAN" dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.
3. **Buku III** memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: "MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH" dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.

Dengan demikian, RPJMN tahun 2010 - 2014 adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat / Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

7.1.2. Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2008. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan hati sanubari rakyat Sumatera Selatan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang, mengacu pada arahan RPJPD Sumatera Selatan tahun 2005 - 2025 (RPJPD), serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, maka Visi Pembangunan Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 adalah:

“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA DAN TERDEPAN BERSAMA MASYARAKAT CERDAS YANG BERBUDAYA”

Sejahtera adalah keadaan di mana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam kehidupannya.

Cerdas adalah sikap pikir profesional yang didasarkan pada landasan moral yang tinggi, kemampuan dan kecakapan dalam membaca situasi, menangkap dan mengolah peluang, serta merancang dan melaksanakan pemecahan masalah dalam semua situasi. Insan dan masyarakat yang cerdas akan selalu optimistis dan mampu memanfaatkan peluang untuk aktivitas yang produktif.

Terdepan adalah keadaan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan penguasaan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang tinggi, berkelanjutan, berada lebih baik dan menjadi acuan bagi daerah-daerah lain.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 tersebut, misi pembangunan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan sumberdaya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal;
2. Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna;
3. Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif, dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas;
4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar;

5. Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan;
6. Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat;
7. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan;
8. Membangun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel;
9. Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya";
10. Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut:

- A. Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia yang andal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan, yaitu:
 - (1) Daerah dengan masyarakat sehat, berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan.
 - (2) Daerah yang masyarakatnya memiliki kemampuan daya saing tinggi, kreatif dan produktif.
- B. Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi, yaitu:
 1. Daerah penghasil pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baik.
 2. Daerah pemasok pangan yang andal yang memperkuat ketahanan pangan nasional.
 3. Daerah pengekspor komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi pendapatan daerah dan devisa.
- C. Mewujudkan daerah lumbung energi nasional
 1. Daerah pemasok sumber daya energi secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, gas metan dan energi terbarukan.
 2. Daerah yang bijak dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam energi, air, hutan dan lain-lain bagi kesejahteraan masyarakat.
- D. Mengembangkan daerah industri maju berbasis sumberdaya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal.
 1. Daerah yang mempunyai kompetensi dalam memanfaatkan sumber daya manusia, alam dan buatan dengan memperhitungkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
 2. Kemitraan strategis yang mampu membangun dalam pengembangan industri pengolahan.

3. Daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat dari nilai tambah industri, serta kompetisi yang sehat, adil, dan terbuka.
- E. Mengembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
 - a. Daerah yang memiliki pusat-pusat penelitian dan lembaga pendidikan dalam pengembangan teknologi yang maju dan modern untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan
 - F. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah.
 1. Daerah dengan jaringan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah.
 2. Daerah dengan jaringan informasi dan komunikasi merata ke seluruh wilayah.
 - G. Mewujudkan jejaring kerjasama ekonomi dan kelembagaan.
 - a. Daerah yang memiliki jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.
 - H. Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.
 - a. Daerah yang mempunyai pelayanan publik, sistem informasi terpadu dan penjamin mutu yang berkualitas
 - b. Daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien
 - c. Daerah dengan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
 - I. Mewujudkan daerah yang mempunyai budaya daerah yang kuat yang berakar pada nilai-nilai luhur,
 - a. Daerah yang mengembangkan dan melestarikan budaya daerah
 - J. Mewujudkan toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama
 - (1) Daerah yang bermasyarakat agamis dan berakhlak mulia
 - (2) Daerah yang mempunyai kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama
 - (3) Daerah maju yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.

Untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- (1) Tujuan 1 : Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia andal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan dengan sasaran :
 - Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan
 - Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan memiliki kemampuan daya saing tinggi.
- (2) Tujuan 2 : Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi, dengan sasaran:

- Terpenuhi pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baik.
 - Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok pangan yang andal yang memperkuat ketahanan pangan nasional.
 - Meningkatnya ekspor komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi pendapatan daerah dan devisa
- (3) Tujuan 3 : Mewujudkan daerah lumbung energi nasional, dengan sasaran:
- Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok sumber daya energi secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, gas metan, dan energi terbarukan.
- (4) Tujuan 4 : Mewujudkan daerah industri maju berbasis sumberdaya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal, dengan sasaran:
- Terwujudnya kompetensi, peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhitungkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan.
 - Berkembangnya kemitraan strategis dalam pengembangan industri pengolahan.
 - Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai daerah penerima terbesar dari sektor industri pengolahan manufaktur.
- (5) Tujuan 5 : Mewujudkan daerah yang dapat menopang kekuatan industri nasional yang berbasis kreativitas dan inovasi, dengan sasaran :
- Berkembangnya pusat-pusat penelitian dan lembaga pendidikan dalam pengembangan teknologi yang maju dan modern untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan
- (6) Tujuan 6 : Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan sasaran :
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
 - Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata keseluruh wilayah.
 - Terwujudnya jaringan informasi dan komunikasi yang merata keseluruh wilayah
- (7) Tujuan 7 : Mewujudkan jejaring kerjasama ekonomi dan kelembagaan dengan sasaran :
- Terwujudnya jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan.
- (8) Tujuan 8 : Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat, dengan sasaran:
- Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
 - Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah yang berorientasi publik.
 - Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat

- (9) Tujuan 9 : Mewujudkan daerah yang mempunyai jati diri sejati yang tidak luntur dengan kemajuan ekonomi dan teknologi, serta pengaruh budaya baru, dengan sasaran:
- Terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis warisan budaya leluhur dan sumber daya daerah yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya.
- (10) Tujuan 10 : Mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan nyaman, dengan sasaran:
- Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia.
 - Terwujudnya masyarakat maju yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.

7.1.3. Amanat RPJP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025

Mengacu pada kondisi daerah dan harapan pada 20 tahun kedepan, maka dapat dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025 adalah **"Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius"**.

- a) **Kabupaten Musi Rawas yang maju** memiliki arti bahwa tingkat kemakmuran masyarakat daerah ini relatif lebih baik dari daerah-daerah lainnya yang tercermin pada tingginya tingkat pendapatan rata-rata penduduk, pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkembangnya lembaga dan pranata sosial kemasyarakatan yang ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Kemandirian daerah yang tinggi tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan aparaturnya pemerintahan daerah yang baik, berkembangnya pemanfaatan sumberdaya lokal serta berkurangnya ketergantungan sumber daya dari daerah lain, sekaligus kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.
- b) **Kabupaten Musi Rawas yang sejahtera** memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, sehingga setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang sejahtera yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan daya beli serta pemerataan pendapatan, meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya derajat pendidikan serta tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan religius.
- c) **Kabupaten Musi Rawas yang religius** memiliki arti bahwa setiap kegiatan ekonomi dan sosial serta pemerintahan dan kemasyarakatan selalu dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, santun dan beretika tinggi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam masa periode tahun 2005 - 2025, adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah
- Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

- Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari.
 - Mewujudkan "Good Governance"
 - Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius.
- d) **Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah** adalah pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah dengan rincian sebagai berikut: pembangunan sumber daya manusia; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif pada sektor – sektor ekonominya; terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang andal dan terintegrasi; terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, terwujudnya Musi Rawas sebagai *Cyber District* melalui pengembangan sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktivitas; dan terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang aman, nyaman dan damai.
- e) **Mewujudkan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan di setiap kawasan dan pelosok wilayah; kabupaten tanpa memandang suku, etnik dan ras, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- f) **Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- g) **Mewujudkan "Good Governance"** yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik, demokratis, menjamin kebebasan berpendapat, memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- h) **Mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang religius** adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Kabupaten Musi Rawas melalui berbagai program pendidikan dan keagamaan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas sebagai "**Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius**" misi Pembangunan Jangka Panjang, maka arah pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

I. MEWUJUDKAN DAYA SAING KABUPATEN MUSI RAWAS

A. Kualitas SDM yang Terus Meningkat dengan Ditandai oleh Meningkatnya Nilai IPM

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks yang menjelaskan tentang keberhasilan pembangunan suatu daerah yang berkenaan dengan kualitas SDM. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah menunjukkan kualitas kehidupan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan tinggi. Lebih lanjut, bahwa IPM terdiri dari beberapa komponen antara lain: indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat yang diukur dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP). Untuk itu, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah:

Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: *pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar *output*-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis merupakan prioritas pembangunan di daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan daerah, setiap warga daerah berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga daerah tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya selama 9 tahun. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tersebut, arah pembangunan akan dilaksanakan sebagai berikut:

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen melalui:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran;
- b. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (*market friendly*);
- c. Meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi Anak Luar Biasa agar dapat hidup mandiri;
- d. Mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dengan :

- a. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta persiapan untuk wajib belajar 12 tahun;
- b. Peningkatan sarana prasarana;
- c. Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Peningkatan akses pendidikan formal, yang terjangkau.

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi kesehatan, haruslah menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit.

Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan, seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit. Dalam upaya terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat, arah pembangunan kesehatan antara lain berfokus pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah tertinggal; pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit;
2. Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, melalui pencegahan dan penanggulangan faktor resiko, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah berbagai penyakit termasuk flu burung; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia zat besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
3. Peningkatan ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat generik, pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);
4. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin;
5. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan;
8. Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat

asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan agenda penting dalam mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk. Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program KB. Sehingga dengan pengendalian ini, ke depan akan terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah. Agar pengendalian pertumbuhan penduduk bisa terwujud serta peningkatan keluarga kecil yang berkualitas, maka arah pembangunan jangka panjang meliputi:

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja;
3. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

B. Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Berkelanjutan, Sehingga PDRB Per Kapita Mencapai di Atas US\$ 7,000.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi daerah untuk bisa memberikan pelayanan optimal dan upaya mensejahterakan bagi masyarakat. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar, yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan penjelasan di atas, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Musi Rawas yaitu berkenaan dengan tercapainya pendapatan per kapita masyarakat minimal US\$ 7,000 = Rp 66.500.000,00 (asumsi US\$ 1 = Rp 9.500,00) adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah) melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan;
- b. Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada;
- c. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya

perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal;

- d. Pengembangan potensi wilayah baik pada daerah aliran sungai, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah potensial lainnya dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- e. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan meningkatkan peluang bagi kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya.

C. Terbangunnya Struktur Perekonomian Yang Kokoh

Struktur perekonomian daerah lazim dibedakan menjadi 9 sektor ekonomi yang tertuang dalam PDRB masing-masing daerah, yakni mulai sektor pertanian sampai sektor jasa. Lebih lanjut, berkenaan dengan pembangunan ekonomi jangka panjang di Kabupaten Musi Rawas sehingga terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh, maka sektor pertanian diharapkan menjadi basis aktivitas kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan dan manufaktur diarahkan sedemikian rupa hingga memiliki daya saing global. Untuk sektor jasa diharapkan dapat memberikan layanan publik yang bermutu dan berkualitas. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka arah pembangunan jangka panjang bisa dirinci sebagaimana di uraian di bawah ini.

Pembangunan pertanian mencakup sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Musi Rawas selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai *multiplier effect* yang besar, karena di sektor ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Musi Rawas menggantungkan hidupnya.

Selain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar, sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak sektor lain, dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap guncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis, dan merupakan sektor yang dapat menopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi berkelanjutan. Pembangunan di Bidang Pertanian ke depan menghadapi masalah antara lain semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkaan sumber daya alam pertanian ditengah kondisi adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan pangan.

Kinerja investasi selama lima tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini menjadi salah satu faktor masih tingginya angka pengangguran. Sejalan dengan pemahaman di atas, dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi dan perdagangan, maka pembangunan jangka panjang diarahkan pada upaya:

- a. Menjamin kepastian usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik di bidang investasi;

- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing;
- c. Penyederhanaan sistem dan prosedur;
- d. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.

Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena di samping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata.

Kabupaten Musi Rawas cukup banyak memiliki potensi obyek pariwisata baik wisata alam, wisata agro maupun wisata budaya yang apabila dikelola dengan manajemen yang baik akan turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Untuk mendukung pengembangan potensi wisata, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Sebab dengan baiknya tingkat aksesibilitas suatu kawasan akan menambah daya tarik wisata yang bersangkutan. Sementara itu, untuk “mengikatkan” antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan obyek wisata dirasa perlu untuk menumbuhkembangkan produk-produk wisata yang terkait dengan UMKM yang ada di daerah-daerah tujuan wisata.

Sehingga untuk meningkatkan peran pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas, maka arah pembangunan sektor Pariwisata dalam 20 tahun yang akan datang adalah:

- a. Meningkatkan dan menumbuhkan kembali potensi pariwisata yang bersumber pada potensi alam dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya, sebagai aplikasi dari Konsep *Ecotourism*;
- b. Meningkatkan kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan diversifikasi produk pelayanan pariwisata yang memenuhi standar pelayanan, berdaya saing serta memenuhi rasa aman dan nyaman;
- c. Memberdayakan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu agar tepat sasaran dan efisien serta menggalang peran serta masyarakat dengan cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan pariwisata, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang kooperatif dan dinamis;
- d. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan; Meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaan Pariwisata di Kabupaten Musi Rawas.

Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Musi Rawas didukung oleh tiga sektor besar, yakni sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian serta sektor industri. Sektor industri diarahkan untuk menjadi sektor yang kompetitif dalam rangka penciptaan struktur ekonomi yang seimbang melalui processing produk-produk agro dan turunannya serta terwujudnya kerjasama maupun kemitraan antar sub-sektor industri. Perkembangan sektor industri tersebut menggambarkan upaya keras Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menarik investor baru melalui penyederhanaan proses perijinan, peningkatan pelayanan perijinan, adanya perencanaan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pertumbuhan investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi perekonomian mulai membaik dan iklim dunia usaha secara

bertahap sudah mendukung pengembangan dunia usaha termasuk pengembangan industri informal. Dalam rangka perwujudan meningkatnya daya saing industri, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan sektor Industri adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk industri-industri yang kuat, meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang dibuat baik pada industri ataupun pada rantai nilainya, memperpanjang rantai nilai baik dengan meningkatkan inovasi maupun penguasaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai nilai untuk meningkatkan keseluruhan produktivitas;
- b. Mengembangkan IMKM agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IMKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan;
- c. Mendorong investasi baru yang diarahkan pada industri yang berorientasi ekspor.

D. Terwujudnya Jaringan Infrastruktur Transportasi dan Ekonomi Yang Andal dan Terintegrasi

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, fungsi pelayanan umum transportasi harus dilakukan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat luas, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional. Kabupaten Musi Rawas juga akan mendukung transportasi antar wilayah yang akan membuka peluang terjadinya perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah melalui pembangunan jalur bebas hambatan.

Dengan adanya pemerataan keterampilan dan keahlian, maupun biaya antar wilayah, maka akan mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Sejalan dengan gambaran di atas, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan transportasi adalah :

- a. Penanganan ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala;
- b. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;
- c. Mendukung sistem jaringan jalan lintas yang mendukung kebutuhan industri;
- d. Membangun sistem jaringan jalan yang mendukung Kawasan Strategis Potensial;
- e. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan;
- f. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan;
- g. Membangun sistem transportasi baik darat, udara dan kereta api serta angkutan sungai.

E. Terwujudnya Pasokan Energi Listrik dan Air Bersih

Untuk menunjang pengembangan industri dan pertumbuhan investasi serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka diperlukan ketersediaan energi listrik yang cukup. Dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, diperlukan alternatif pilihan energi untuk mengurangi

ketergantungan terhadap energi listrik. Pembangunan di bidang sumberdaya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperilaku yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumberdaya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air. Potensi volume air yang cukup melimpah berupa sungai dan mata air, merupakan keunggulan dalam rangka peningkatan volume dan kualitas produk pertanian serta kualitas hidup masyarakat dalam bentuk penyediaan air bersih. Potensi tersebut juga merupakan peluang bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah sendiri melalui kerjasama investasi/ pengelolaan sumber air dengan daerah lain.

Sementara itu, berkenaan dengan terwujudnya pasokan air yang cukup dan layak, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan persoalan di atas adalah:

- a. Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan;
- b. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;
- c. Pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;
- d. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

F. Terwujudnya Musi Rawas *Cyber District*

Arah kebijakan untuk terwujudnya Musi Rawas *Cyber District* antara lain:

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;
- b. Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemerataan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;
- c. Meningkatkan peran media massa dan *cyber-media* yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi sehingga dalam aspek pelayanan publik sudah tidak perlu lagi temu muka antara pelayan dan yang terlayani;
- e. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi.

G. Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang Aman, Tertib dan Damai

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, Kabupaten Musi Rawas memerlukan kemampuan pertahanan daerah yang kuat untuk menjamin tetap tegak dan eksisnya daerah Kabupaten Musi Rawas. Demikian pula dengan adanya gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horizontal yang akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting terlaksanannya pembangunan berbagai bidang dan merupakan salah satu daya saing yang harus terjaga.

- Keamanan dan ketertiban daerah diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan dan pembangunan keamanan dalam daerah serta pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografis, demografi, sosial dan budaya serta berwawasan nusantara;
- Sistem dan strategi pertahanan daerah secara terus menerus disempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta berdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara simultan mampu mengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar. Dalam sistem pertahanan semesta tersebut, pertahanan daerah akan didesain untuk mempunyai kemampuan menangkal ancaman di wilayah teritorial Kabupaten Musi Rawas dan kemampuan untuk mempertahankan wilayah daratan, serta mengawasi dan melindungi wilayah ruang udara daerah;
- Pemantapan komponen cadangan dan dukungan pertahanan daerah dalam kerangka basis strategis teknologi dan pembiayaan terus ditingkatkan dalam proses yang bersifat kontinyu maupun terobosan. Peningkatan kemampuan komponen dukungan pertahanan tersebut meliputi penguasaan kemampuan pemanfaatan kondisi SDA dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan prasarana daerah terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan, komponen bela daerah masyarakat, dukungan mutualisme industri strategis secara langsung maupun kemampuan konversi industri, serta keberlanjutan pembiayaan melalui rekayasa keuangan;
- Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

II. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen di Kabupaten Musi Rawas akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan juga akan mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Musi Rawas yang maju pada berbagai bidang. Perekonomian daerah yang kuat merupakan keniscayaan dalam era desentralisasi ekonomi, karena daerah telah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola pembangunan secara relatif mandiri. Penguatan ekonomi daerah itu baru bermakna apabila seluruh masyarakat terlibat dalam kegiatan perekonomian. Di sinilah urgensinya dikembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan yang memiliki dua dimensi, *pertama*, orientasi pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, faktor produksi dan aset produktif yang dimiliki, serta dikelola oleh masyarakat. Dengan jalan ini diharapkan pemerataan dan keadilan pembangunan dapat dicapai.

A. Tingkat Pembangunan Semakin Merata Diseluruh Wilayah

1. Mengoptimalkan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), dengan memberdayakan potensi dari setiap kecamatan yang tetap memfokuskan pada aktivitas di SWP tersebut.
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
3. Pertumbuhan Kabupaten Musi Rawas dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan Agropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembagunan yang berkelanjutan, melalui: (1) Penerapan manajemen perkotaan untuk pengembangan Agropolitan dan kawasan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga disekitarnya dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota kecil disekitar agropolitan agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kota satelit tetapi dapat menjadi kota mandiri; (2) Pengembangan ekonomi perkotaan di kawasan Agropolitan yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain; serta peningkatan kemampuan keuangan daerah agropolitan; dan (3) Pengembangan kawasan agropolitan melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda.
4. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan tertinggal dan terpencil sehingga kawasan-kawasan tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara cepat dan dapat memperbaiki keteringgalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung, termasuk jaminan pelayanan publik dan keberintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
5. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal mata rantai industri, tahap produksi antara, tahap akhir produksi, sampai tahap konsumsi, serta perlu didukung, dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar kota/kawasan disekitar Kabupaten Musi Rawas.
6. Tidak meratanya sarana dan prasarana, menyebabkan penyebaran penduduk di Kabupaten Musi Rawas tidak merata, di mana penduduk lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat yang telah berkembang, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah-wilayah di mana kepadatan penduduk rendah, agar wilayah tersebut nantinya dapat menyerap tenaga kerja;
7. Terdapat keluarga pra-sejahtera pada daerah pertanian, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat petani agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
8. Peningkatan pembangunan suatu wilayah dimungkinkan, jika ada akses pada wilayah tersebut. Artinya, perlu adanya pemberdayaan pada wilayah yang tertinggal di Kabupaten Musi Rawas.
9. Pembangunan ekonomi wilayah akan lebih efisien dengan kerjasama antar daerah, terutama daerah yang saling berdekatan.

10. Pemerintah daerah lebih menekankan dan mempercepat pemberdayaan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang.
11. Mengoptimalkan wilayah-wilayah potensial untuk lebih berdaya, yang nantinya dapat membantu wilayah lain yang kurang berpotensi.
12. Percepatan pembangunan kawasan-agropolitan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan topologi kawasan masing-masing.
13. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di Agropolitan center dengan hinterland didorong secara sinergis yang memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktifitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di agropolitan center.
14. Pembangunan pedesaan didorong melalui: pengembangan agropolitan terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian; peningkatan kapasitas SDM di pedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil dalam upaya menciptakan keterkaitan sektor sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *sosial capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
15. Memanfaatkan Rencana Tata Ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.
16. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan insentif/disentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penerapan peraturan perundang-undangan pertanahan di daerah dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; selain itu perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanahan.
17. Pengembangan kapasitas pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan; keuangan pemda termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan; penguatan lembaga legislative. Selain itu pemberdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui: peningkatan pengetahuan dan ketrampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.

18. Peningkatan kerja sama dengan daerah-daerah lain dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun pembangunan lainnya.
19. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana.
20. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung dengan peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
21. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya pewujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

B. Terwujudnya Kemandirian Pangan

- a. Mengoptimalkan dan mengembangkan lahan pertanian sebagai penghasil tanaman pangan dan melengkapinya dengan infrastruktur, misalnya saluran irigasi dan bendungan untuk meningkatkan hasil tanaman pangan.
- b. Mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang sebagian sudah menghasilkan dan berperan penting dalam meningkatkan PDRB, seperti misalnya sektor pertanian, sektor tanaman perkebunan dan perikanan merupakan sumber daya alam yang potensial untuk dioptimalkan.
- c. Mengembangkan pengolahan hasil sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempunyai kualitas gizi yang baik dan ramah lingkungan, seperti subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan perikanan yang meningkat dapat diberdayakan dengan melakukan pengolahan, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik.
- d. Kegiatan-kegiatan sosialisasi informasi pada makanan bergizi, kesehatan masyarakat, dan penyuluhan pertanian dilakukan dengan melibatkan instansi/dinas terkait, misalkan Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan pangan yang memadai.
- e. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman merata dan terjangkau.
- f. Koperasi yang berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisien kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen diberbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan

pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

C. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan yang Dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Pendukungnya

- a. Dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja pada pembangunan perumahan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduk rendah, menuju wilayah mandiri.
- b. Bekerjasama dengan sektor swasta (misalnya: investor/para pengembang) agar dapat membiayai terlaksananya pembangunan perumahan yang memadai.
- c. Melakukan perbaikan pada sarana transportasi untuk menarik investor/pengembang datang ke Kabupaten Musi Rawas.
- d. Melakukan relokasi pada rumah-rumah yang berada di tepi sungai, perbukitan atau kawasan peyangga TNKS, dengan memberikan penyediaan sarana dan prasarana.
- e. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya diarahkan pada: Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien; mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan swasta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; serta memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

III. MEWUJUDKAN KABUPATEN MUSI RAWAS YANG ASRI DAN LESTARI

Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan yang dapat dilihat dari pendapatan per kapita, sedangkan kualitas hidup ditentukan oleh faktor yang lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Sungguh pun begitu, tidak selamanya proses pembangunan yang mensejahterakan rakyat diikuti dengan kesinambungan proses pembangunan itu sendiri akibat terjadinya kerusakan lingkungan. Inilah yang banyak terjadi di daerah terbelakang. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara merusak lingkungan, seperti eksploitasi pertambangan, minyak, hutan, dan lain-lain. Model pembangunan seperti ini harus dicegah sehingga hasil pembangunan yang dinikmati hari ini tidak akan mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang berdaya saing, sejahtera dan mandiri, SDA dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
- Pendayagunaan SDA yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, serta diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- Dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, sangat perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi ekonomi semata tetapi juga mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- Di dalam memelihara kekayaan dan keragaman SDA untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing masyarakat sangat memerlukan kebijakan pengelolaan SDA yang didukung oleh peningkatan kelembagaan SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
- Menjaga dan melestarikan sumber daya air sangat penting untuk menunjang kehidupan dan keberlanjutan pembangunan. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Dengan demikian pengelolaan sumber daya air ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat akan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Fokus kebijakan ini dapat diarahkan kepada generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyediakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, jaminan sosial, dan lain-lain sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat

terhadap pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam (sebagai cara untuk menambah pendapatan).

- Mendayagunakan SDA yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkan kembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
- Mengelola SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input untuk proses produksi berikutnya sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomasa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus sungai, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakat dengan demikian pembangunan energi terus diarahkan kepada penganekaragaman energi, konservasi energi, dengan memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi yang optimum bagi tiap jenis energi.
- Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas. Diversifikasi produk dan inovasi pengelolaan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arah ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis SDA, di samping tetap menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang ada di wilayahnya. Dengan demikian pembangunan ke depan tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.
- Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap wilayah. Kebijakan pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah secara berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi ditingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas SDA. Pengelolaan SDA terutama di kawasan tertinggal diberikan perhatian khusus agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan kawasan, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu diperlukan tata ruang yang mantap disertai penegakan hukumnya untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.

- Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan, sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- Meningkatkan kapasitas pengolahan SDA dan lingkungan hidup. Kebijakan pengolahan SDA perlu di dukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan peraturan lingkungan hidup yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan, etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasike dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

IV. MEWUJUDKAN "GOOD GOVERNANCE"

Kabupaten Musi Rawas yang demokratis merupakan landasan yang sangat penting di dalam perwujudan pembangunan yang lebih maju, berdaya saing, sejahtera, dan mandiri. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah transparansi kebijakan. Hukum sendiri pada dasarnya akan memastikan munculnya aspek-aspek keadilan dan kebersamaan. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi setiap anggota masyarakat secara menyeluruh. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur daerah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara daerah terhadap prinsip-prinsip ke tata pemerintahan yang baik. Dengan memiliki tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelayanan publik akan semakin efisien dan pembiayaan pembangunan tidak lagi hanya dipikul oleh kemampuan keuangan pemerintah sendiri, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat.

- b. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan daerah secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa lokal yang independen; (c) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas untuk memudahkan proses sosialisasi dan transparansi kebijakan.
- c. Memfasilitasi dan menjalin kemitraan yang baik dengan berbagai organisasi dan lembaga profesi hukum dan badan peradilan sehingga aparat hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan pelaksanaan pembangunan sektor hukum dapat berkembang dengan menunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh kondisi daerah yang baik agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparat hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- d. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses terhadap pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga daerah serta terbentuk perilaku warga Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dalam kerangka *good and clean governance* yang mendukung akselerasi pembangunan daerah, yaitu: meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif; meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; meningkatkan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola remunerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi; meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab; mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik; meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.

V. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS

Mewujudkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui berbagai program yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kedaerahan.

- a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kerukunan antar umat beragama; Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak.
- c. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.
- e. Menciptakan program menuju Musi Rawas Darussalam.
- f. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat ditunjukan untuk mewujudkan karakter bangsa yang merupakan kombinasi antar nilai-nilai luhur seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern untuk pembangunan.
- g. Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kabupaten Musi Rawas menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global yang dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersama dengan pengarah budaya konsumtif budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional.

Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.

7.1.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Bertitik tolak dari arahan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010 - 2014, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJPD Kabupaten Musi Rawas 2005-2025, dimana RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 merupakan RPJMD periode kedua dari RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025, maka Kebijakan Umum Pembangunan Daerah diarahkan pada tiga pilar pembangunan yaitu : Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam.

7.1.4.1. Musi Rawas Bumi Agropolitan

Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentuk campuran yang dinamakan **agropolis** atau kota di ladang.

Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan; (2) mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang; (3) memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku; (4) memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; (5) memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. Sedangkan Agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut, sehingga menjadi produk jadi dan siap untuk dikonsumsi, atau produk antara dan siap untuk proses lebih lanjut.

Pengembangan Agroindustri diperlukan agar tercipta keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga proses transformasi struktur perekonomian berjalan dengan baik dan efisien dari dominasi pertanian menjadi dominasi industri. Struktur perekonomian seimbang yang terwujud akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu : (1) kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan daerah secara relatif menurun, sedangkan sektor-sektor diluar sektor pertanian mengalami kenaikan terutama untuk sektor industri; (2) penyerapan tenaga kerja secara relatif menurun sedangkan sektor-sektor diluar sektor pertanian mengalami kenaikan; (3) sektor pertanian mampu menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan nasional; (4) sektor pertanian mampu menyediakan bahan baku untuk keperluan industri daerah, dan ; (5) produktifitas tenaga kerja disektor pertanian relatif sama besarnya dengan produktifitas tenaga kerja di luar sektor pertanian.

7.1.4.2. Musi Rawas Kawasan Pertambangan

Musi Rawas sebagai gerbang investasi tidak bias lepas dari letak geografi dan kandungan bumi Musi Rawas. Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2010 - 2015).

7.1.4.3. Musi Rawas Darussalam.

Selama ini pemerintah pusat maupun daerah, lebih konsen membangun pembangunan fisik dibandingkan dengan non fisik seperti penguatan karakter bangsa. Akibatnya banyak terjadi degradasi moral, baik di lingkungan masyarakat maupun birokrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dikembangkan pilar Musi Rawas Darussalam. Dalam konsep Musi Rawas Darussalam dikembangkan keseimbangan antara fisik dan rohani sehingga terwujud karakteristik masyarakat yang madani dengan tiga pilar darussalam, yaitu: Musi Rawas Sehat, Musi Rawas Cerdas, dan Musi Rawas Mapan.

Ada dua komponen dalam kultur Darussalam yaitu : a) Masyarakat sebagai Warga Negara, dan b) Birokrasi sebagai pemegang amanah rakyat. Dengan demikian, maka penguatan kultur Darussalam dilakukan dengan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, baik bagi warga masyarakat maupun birokrasi.

Dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama, maka gerakan Good Governance yang telah dicanangkan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dimantapkan. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.

Permasalahan pembangunan beragama sebagai berikut : (1) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat kurang memadai ; (2) kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial ; (3) berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan; (4) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan ; (5) rendahnya kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana pendidikan agama ; (6) pelayanan kehidupan beragama belum memadai ; (7) sarana

dan prasarana ibadah belum optimal pemanfaatannya dan belum efektif pengelolaan dana sosial keagamaan.

Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama sebagai pilar Musi Rawas Darussalam diarahkan pada : a) Pengembangan kultur Darussalam, dan b) Penataan Kepemeintahan dan SDM. Kedua agenda ini sangat berkaitan, sebab pengembangan kultur darussalam sangat terkait dari percontohan birokrasi dan masyarakat, sebaliknya kultur darussalam akan menopang tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan umum yang berisi tentang arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 - 2015 disajikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama	1. Peningkatan semangat dan perilaku masyarakat dan aparat dalam beragama	1. Jumlah santri khatam Al-qur'an	3.730 orang	38.371 orang	- Program pengembangan wawasan kebangsaan	- Kesbanglinmas dan Politik Dalam Negeri - Pendidikan - Otonomi Daerah - Pekerjaan Umum	- Sekretariat Daerah - Badan Kesbangpol dan Linmas - Dinas Pendidikan - PU Cipta Karya
			2. Persentase masyarakat muslim bebas buta aksara alqur'an	50%	90%			
			3. Persentase aparat yang aktif dalam pengajian rutin bulanan SKPD	0%	100%			
		2. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan	1. Persentase majelis ta'lim yang aktif	50%	100%			
		3. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama	1. Persentase rumah ibadah yang meningkat fasilitas ibadahnya	80%	90%			
2. Meningkatnya toleransi kehidupan inter dan antar umat beragama	1. Peningkatan kerukunan antar umat beragama	1. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat integritas sosial masyarakat	1. Jumlah tokoh masyarakat yang meningkat kesadarannya dalam membina kerukunan hidup beragama di kecamatan	80 orang	420 orang	- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program	- Kesbangl inmas dan Politik Dalam Negeri - Otonomi Daerah	- Sekretariat Daerah - Badan Kesbangpol dan Linmas

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
						Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan		
		2. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini;	1. Persentase penyelesaian konflik yang mengandung sentimen keagamaan	100%	100%	- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		
		3. Pencegahan konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;	1. Persentase penyelesaian konflik yang berlatar belakang agama yang teratasi	100%	100%	- Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
3. Meningkatnya percontohan dan peneladan karakter darussalam	1. Penguatan kultur darussalam	1. Penanaman wawasan Darussalam di sekolah	1. Persentase sekolah bersertifikat sebagai sekolah berwawasan Darussalam	0%	100%	- Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	- Pendidikan	- Dinas Pendidikan - Sekretariat Daerah
		2. Penanaman kultur darussalam di dalam kelompok-kelompok keagamaan	2. Persentase masyarakat muslim yang menjadi anggota majelis Ta'lim	15%	50%	- Program Pendidikan Non Formal		
4. Menurunnya angka kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan	1. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan	1. Persentase angka kemiskinan	19,33%	9,20%	- Program Pembangunan	- Kesejahteraan sosial	- Seluruh SKPD terkait Penanggulangan

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		daerah	2. Persentase pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan terhadap total kebutuhan	2%	6%	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Perhubungan	kemiskinan
		2. Peningkatan akses penduduk terhadap transportasi, listrik, informasi, komunikasi, air bersih, serta pasar dan modal	3. Persentase jumlah Desa Berlistrik	87%	100%	- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	- Energi dan Sumber Daya Mineral	- Dinas Pertambangan dan Energi
			4. Jumlah website milik pemerintah daerah	1 buah	1 buah		- Komunikasi dan Informaika	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
			5. Persentase Sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan	75%	100%	- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	- Kesehatan	- Dinas Kesehatan
			6. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	2%	12%		- Perumahan	- Dinas Kesehatan
							- Ketahanan Pangan	- Dinas PU Cipta Karya
		3. Pemenuhan hak atas pangan	1. Jumlah Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan dan Peralatan Lumbung	10 Desa Mapan, 10 lumbung, 10 unit peralatan lumbung	10 Desa Mapan, 18 lumbung, 18 unit peralatan lumbung	- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Sungai dan Kereta Api	- Ketahanan Pangan	- Dinas PU Cipta Karya
			2. Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,3%	91,5%		- Ketenagakerjaan	- Badan Ketahanan Pangan
		4. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,13%		- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Sungai dan Kereta Api	- Ketenagakerjaan	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	- Kesbanglinmas dan Politik	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						- Program Pembangunan Pembangkit Listrik	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	- Badan Kesbangpol dan Linmas
						- Program Pengembangan		- Badan Keluarga Berencana

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
						Energi Alternatif - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa - Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi - Program Kerjasama Informasi dan Media Masa - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Perumahan dan Penyehatan Lingkungan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		5. Pemenuhan hak atas rasa aman	1. Angka kriminalitas yang tertangani	60%	90%	Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
			2. Persentase desa yang mempunyai bangunan pos jaga/ronda	100 %	100%	- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan		
		6. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar	1. Laju pertumbuhan penduduk	3,2%	1,5%	- Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
			2. Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	24%	10%	- Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		
						- Program Keluarga Berencana		
						- Program pelayanan		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
						kontrasepsi - Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan pelayanan pendidikan	1. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini	APK PAUD/TK	15,1%	70%	- Program PAUD - Program Dikdas Dan Wajar 9 Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen Pelayanan	- Pendidikan	- Dinas Pendidikan
			APM PAUD/TK	13,15%	62%			
		2. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu	Rata-rata lama sekolah naik	7,1 tahun	9,0 tahun			
			APK SD/MI/Paket A	113,8%	115,5%			
			APM SD/MI/Paket A	97,63%	98,50%			
		3. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara	Angka Buta Aksara	2,27%	0,5%			
		4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui jalur formal dan non formal	APK SMP/MTs/Paket B	94,41%	100,0%			
			APM SMP/MTs/Paket B	84,59%	94,0%			
			APK SMA/SMK/MA/Paket C	65,50%	85,0%			
			APM SMA/SMK/MA/Paket C	57,55%	80,0%			
		5. Meningkatkan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berpendidikan minimal S.1 / D.4	48,00%	82,5%			
		6. Menyusun Peraturan Daerah tentang pelajaran budi pekerti,	Persentase Sekolah bersertifikat sebagai sekolah berwawasan	0%	100%			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		akidah, akhlak dan ibadah sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan dalam rangka pembinaan akhlak mulia	Darussalam			Pendidikan		
		7. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan komitmen dalam melaksanakan tugas pengajaran	Rasio guru terhadap murid SD	1:26,5	1:22,00			
			Rasio guru terhadap murid SMP	1:32,15	1:27,50			
			Rasio guru terhadap murid SLTA	1:35,30	1:30,00			
		8. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan	Persentase data dan informasi pendidikan berbasis website	20%	100%			
			Pemanfaatan ICT untuk Pembelajaran	5%	25%			
		9. Meningkatkan peran serta mitra kerja Dinas Pendidikan dalam pembangunan pendidikan	Pemberdayaan Komite Sekolah	20%	100%			
			Jumlah Lembaga dan program PNF telah terakreditasi	2	10			
		10. Meningkatkan pengembangan pendidikan tinggi (Universitas Musi Rawas)	Jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi	1	1			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab	
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)				
	2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.	Cakupan rawat jalan Puskesmas (%)	8,24	15	- Program obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Cakupan rawat inap Puskesmas (%)	0,66	1,5				
			Umur harapan hidup (Tahun)	64,44	72	- Program pengawasan obat dan makanan			
			Angka kematian bayi	49,55	24				
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	- Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
			Rasio posyandu per satuan balita per 10000 penduduk (%)	69,94%	76,00%				
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0059	0,009	- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
		2. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas terutama di daerah kurang diminati dan rawan bencana.	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,084	0,11				
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,12	0,16	- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			
		3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	63,62%	100%	- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2,18%	100%				
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	15,56%	100%				
		4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat.	Persentase Sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan	80%	100%	- Program pengadaan,			
			Pesentase Tempat-Tempat Umum	80%	100%				

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
			(TTU) yang memenuhi syarat kesehatan			peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit mata		
			Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	80%	100%			
			Persentase rumah sehat	80%	100%			
		5. Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring.	Persentase data program kesehatan yang up to date, valid, lengkap dan terintegrasi	100%	100%	- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		
					- Program perbaikan gizi masyarakat			
						- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		
						- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
						- Program peningkatan		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
						pelayanan kesehatan anak balita - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - Program perencanaan pembangunan daerah - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		
6. Meningkatnya pembangunan perdesaan dan	1. Pembangunan perdesaan dan pemberdayaan	1. Pengembangan ekonomi wilayah di wilayah tertinggal dan perbatasan	Persentase Desa yang Meningkatkan Perekonomiannya	100%	100%	- Program Perencanaan Pembangunan	- Perencanaan Pembangunan	- Bappeda - Badan

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
Pemberdayaan KAT	KAT		Jumlah desa tertinggal	22 desa	0 desa	Daerah	- Otonomi Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		2. Peningkatan infrastruktur perdesaan	Persentase Desa yang Meningkatkan Infrastrukturnya	100%	100%	- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	- Sosial	- Dinas Sosial
		3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan di tingkat perdesaan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat	Persentase Kepala Desa yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	18%	100%	- Program peningkatan keberdayaan masy. Desa		
			Persentase aparat desa yang berperan aktif dalam pembangunan perdesaan	36%	100%	- Program Peningkatan partisipasi masy. Dalam membangun Desa		
		4. Memaksimalkan pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi tepat guna sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna pengembangan potensi ekonomi perdesaan	Persentase masyarakat desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam perekonomian desa	36%	60 %	- Program peningkatan kapasitas aparatur Pemdes		
		5. Meningkatkan pembinaan kelembagaan desa dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat perdesaan	Persentase Lembaga desa yang dibina	100%	100%	- Program penguatan sekretariat BPMPD		
		6. Perlindungan dan jaminan sosial kepada KAT	Jumlah masyarakat KAT yang mendapat jaminan sosial	1.388 Orang	1.388 orang	- Program		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
						penguatan Bidang Pemerintahan Desa - Program penguatan Bidang Teknologi Tepat Guna - Program penguatan Bidang UED dan Sosbud - Program Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.		
7. Terciptanya perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan	1. Penciptaan perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan	1. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial	Persentase masalah PMKS yang teratasi	10,6%	75%	- Program Pembinaan Anak Terlantar - Program Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Sosial	
		2. Meningkatkan pemberdayaan	Jumlah PMKS yang memiliki	982 orang	4.822 orang			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		masyarakat miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya	keterampilan			- Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo		
		3. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;	Jumlah kecamatan yang siap siaga dalam penanganan bencana	5 kecamatan	10 kecamatan	- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (Eks Narapidana, PSKS, Narkotika dan Penyakit sosial lainnya).		
			Jumlah TAGANA yang profesional	55 orang	279 orang	- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
8. Meningkatnya kapasitas ketenagakerjaan dan kependudukan	1. Peningkatan kapasitas Ketenagakerjaan dan kependudukan	1. Peningkatan perencanaan dan system informasi ketenagakerjaan dan kependudukan	Persentase ketersediaan Buku Sakerda yang tersedia	100%	100%	- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Ketenagakerjaan	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi
		2. Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan fungsional;	Jumlah Instruktur dan Tenaga Pelatihan profesional	20 orang	100 orang	- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga		
		3. Peningkatan dan pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	200 orang	1400 orang			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		5. Peningkatan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta mengeliminir eksekse negatif yang timbul akibat kebijakan ini	Jumlah AKL yang ditempatkan	100 orang	500 orang	Ketenagakerjaan - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		
		6. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja di perusahaan	Jumlah pekerja yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	40 Org	200 Org			
		7. Membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah	Jumlah pengangguran terbuka yang terserap di perusahaan	1044 Org	5220 Org			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
9. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1. Peningkatan pemberdayaan perempuan	1. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan pemahaman konsep gender dan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	2,76%	30%	<ul style="list-style-type: none"> - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan - Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan
			Fasilitas pengembangan pusat terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	0 kali	1 kali	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 		
			Frekuensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	4 Kecamatan	21 kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
						dalam pembangunan - Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		
10. Meningkatnya peran pemuda dan olah raga	1. Peningkatan peran pemuda dan olah raga	1. Membentuk pemuda mandiri, kreatif dan semangat kebangsaan yang tinggi	Jumlah organisasi pemuda	18 klp.	30 klp	- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - Program peningkatan peran serta kepemudaan - Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba - Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen	- Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemua dan Olahraga
			Jumlah kegiatan kepemudaan	5 kali	8 kali			
			Frekuensi Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, Pengembangan Produktifitas Peternakan/Perikanan, dan kepramukaan dalam setahun	1 kali	1 kali			
		2. Peningkatan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga sebagai salah satu alternatif hidup sehat.	Jumlah klub olah raga	30 klub	50 klub			
			Jumlah gedung olah raga	1 unit	2 unit			
			Jumlah organisasi olah raga	19 Kelompok	30 Kelompok			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
						Olahraga - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		
11. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian	1. Revitalisasi pertanian	1. Peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kelembagaan pendukungnya	Jumlah Gapoktan yang ditingkatkan kemampuannya	57 Gapoktan	220 Gapoktan	- Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	- Urusan Pertanian - Urusan Kelautan dan Perikanan	- Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
			Jumlah Kelompok Usaha Kecil Bidang Pangan yang dibina	10 UKBP	50 UKBP			
			Cakupan bina kelompok tani	45 Klp.	315 klp.			
			Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya melalui bintek, temu karya dan temu usaha	950 Org	2.650 orang			
			Jumlah Penyuluh Pertanian yang Meningkat Kapasitas SDM nya	70 Org	378 Org			
12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pertanian		2. Peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian	Produksi padi (ton)	281.789	350.119	- Program pengkajian teknologi		- Dinas Peternakan dan Perikanan - Dinas Perkebunan
			Produksi Jagung (ton)	1.119	1.405			
			Produksi Kedelai (ton)	946	1.189			
			Produksi Ubi Kayu (ton)	9.372	10.067	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi		
			Produksi daging (ton)	3.122,49	3.922,57			
			Produksi telur (kg)	1.168.763	1.535.059			
			Produksi ikan konsumsi (ton)	19.283,28	158.518,28			
			Produksi Benih Ikan (.000 ekor)	284.845	809.828			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
			Produksi Karet (Ton/Th)	245.000	255.000	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi Pertanian - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Pengembangan Budi Daya Perikanan 		
			Produksi Sawit (Ton/Th)	300.000	310.000			
13. Meningkatnya kualitas komoditas unggulan dan pasar	1. Pengembangan komoditas unggulan dan pasar	1. Optimalisasi potensi sumberdaya local	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal yang dikembangkan	4 Komoditi	5 Komoditi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian - Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Dan Energi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Energi dan Sumberdaya Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Pertambangan dan Energi
		2. Pengembangan jaringan pasar hasil pertanian	Persentase hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah yang dipromosikan	50%	100%			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
14. Terwujudnya industri pertanian	1. Pengembangan industri pertanian	1. Penanganan pascapanen dan agroindustri	Penurunan loses (%)	17%	12%	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Perkebunan - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar - Dinas Peternakan dan Perikanan
15. Terwujudnya infrastruktur agropolitan dan kawasan cepat tumbuh	1. Pengembangan Infrastruktur Agropolitan dan Kawasan Cepat Tumbuh	1. Pengembangan irigasi skala besar (Air Lakitan dan Air Rawas)	Persentase jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap jaringan yang ada	48%	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawas dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Pembangunan Jalan - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Peningkatan 	- Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Bina Marga - Dinas PU Pengairan - Dinas PU Cipta Karya
		2. Peningkatan jaringan jalan di kawasan cepat tumbuh di agropolitan center dan agropolitan distrik	Panjang jalan yang kondisinya baik	83,50 Km	82,89 Km			
			Rasio sarana dan prasarana kebinamargaan yang kondisinya baik	15%	90%			
		3. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis kawasan, khususnya agropolitan center dan agropolitan distrik	Terbangunnya terminal peti kemas	0	1 Unit			
		4. Pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan	Terbangunnya kawasan perkantoran	31 Unit	37 Unit			
			Terbangunnya kawasan sport center	0 Unit	1 Unit			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		5. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan center dan agropolitan distrik	Terbangunnya ruko di AC dan AD	16 Blok	20 Blok	Sarana dan Prasaran Kebina Margaan		
			Tersedianya RTH di kawasan AC dan AD	4 Ha	70 Ha	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
			Terbangunnya pasar di kawasan AC dan AD	6 Unit	10 Unit			
			Tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3 Unit	3 Unit			
			Terbangunnya kawasan wisata air	0 Unit	1 Unit	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		
			Terbangunnya masjid agung darusalam	1 Unit	1 Unit			
			Terbangunnya lapangan golf dan hutan kota	0 ha	60 ha			
			Terbangunnya kawasan pergudangan dan pangkalan truk di AC	0 Unit	1 Unit	- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan		
						- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		
						- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
16. Meningkatnya kinerja kelembagaan kemitraan pertanian	1. Penguatan kelembagaan kemitraan pertanian	1. Penguatan kelembagaan mitra (<i>stakeholder</i>)	Jumlah dan jenis mitra bidang pertanian	4 Jenis mitra (Bidang pengairan, bidang Alsintan, bidang pengendalian Organisme pengganggu tanaman (RPH) dan bidang pendanaan (perbankan/ keuangan)	4 Jenis mitra (Bidang pengairan, bidang Alsintan, bidang pengendalian Organisme pengganggu tanaman (RPH) dan bidang pendanaan (perbankan/ keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawas dan Jaringan Pengairan Lainnya - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Umum - Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU Pengairan - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
17. Meningkatnya ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan	1. Peningkatan ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan	1. Pemantapan swasembada beras melalui peningkatan produksi berkelanjutan	Produksi padi (ton)	312.150	377.948	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan Pangan - Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Badan Ketahanan Pangan
		2. Peningkatan Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina	4 Gapoktan	16 Gapoktan			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
18. Meningkatnya kesejahteraan petani	1. Peningkatan kemandirian dan daya beli petani	1. Peningkatan pendapatan dan SDM petani	Jumlah kelompok tani yang meningkat SDM nya Jumlah Gapoktan yang meningkat SDM nya	45 Kelompok 100 kelompok	315 Kelompok 100 kelompok	- Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan - Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	- Pertanian	- Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
19. Terwujudnya kelestarian sumber daya hutan	1. Revitalisasi pertanian	1. Rehabilitasi lahan kritis	Areal lahan kritis yang ditanami	12.256 Ha	82.695 Ha	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Urusan Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Produksi bibit tanaman kehutanan	50.000 btg/th	1.000.000 btg/th	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		
			Jumlah pemegang HTI yang aktif	1 FMU	5 FMU	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		
		2. Pemantapan kawasan hutan	Jumlah aparat kecamatan yang meningkat pengetahuannya tentang kawasan hutan	0 orang/thn	42 orang/thn			
			Fasilitasi percepatan penataan batas luar maupun batas fungsi	876,93 km	1.002,93 km			
			Jumlah KPHP yang meningkat kelembagaannya	2 UPTD	2 SKPD			
			Jumlah kelompok kawasan hutan yang mempunyai data kondisi kawasan hutan	0 kelompok	21 kelompok			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab	
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)				
			Luas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dibangun	0 Ha	20.375 Ha				
			Penggunaan kawasan sesuai peraturan	0 wilayah	3 wilayah				
			3. Peningkatan upaya perlindungan hutan	Penurunan jumlah hotspot	352 titik				50 titik
				Penurunan jumlah kasus perambahan kawasan dan illegal logging	6 kasus				2 kasus
20. Meningkatnya pengelolaan pertambangan	1. Penataan kegiatan penambangan	1. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha pertambangan, yang diharapkan mampu meningkatkan PAD sektor non migas	Persentase Perusahaan Pemegang IUP yang memenuhi kewajiban	70%	100%	- Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Dan Energi - Program Penyediaan Infrastruktur penunjang Kegiatan Pertambangan - Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang	- Energi dan Sumber Daya Mineral	- Dinas Pertambangan dan Energi - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan	
		2. Penyelesaian sengketa wilayah pertambangan	Persentase penyelesaian sengketa wilayah pertambangan	30 %	100%				
		3. Inventarisasi dan pemetaan potensi geologi	Persentase ketersediaan data potensi bahan galian daerah	60%	100%				
	2. Pengelolaan berwawasan lingkungan	1. Peningkatan pengelolaan pertambangan dan energi melalui percepatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang berwawasan lingkungan	Persentase penambangan yang menerapkan good mining practice	60%	100%				

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
	3. Pengembangan akses khusus pertambangan	1. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pemda kabupaten dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pembangunan dan pembiayaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Pertambangan	40%	80%	Berpotensi Merusak Lingkungan - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
21. Meningkatnya pengelolaan energi listrik	1. Pengembangan kelistrikan	1. Percepatan pembangunan kelistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik dan energy alternative 2. Pengembangan energi alternative	Persentase jumlah Desa Berlistrik	87%	100%	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan - Program Pembangunan Pembangkit Listrik - Program Pengembangan Energi Alternatif - Program pengembangan pengelolaan persampahan - Program pengendalian pencemaran dan persakan lingkungan hidup	- Energi dan Sumberdaya Mineral - Lingkungan Hidup	- Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas PU Bina Marga - Badan Lingkungan Hidup
22. Meningkatnya Pengelolaan energi alternatif	1. Percepatan kemandirian energi							
23. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengelolaan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Rehabilitasi lahan Persentase Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0% 5%	20% 100%	- Program		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		2. Meningkatkan Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penyediaan sarana persampahan	22%	100%	perlindungan dan konservasi SDA		
			Persentase Pemantauan Kualitas Air	22%	100%	- Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA		
			Persentase Pengawasan Kinerja Perusahaan	50%	100%			
		3. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan	100%	100%	- Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup		
			Persentase Sekolah Adiwiyata	19%	57%	- Program peningkatan pengendalian polusi		
						- Program pengendalian kebakaran hutan		
24. Meningkatnya pelayanan perizinan	1. Peningkatan pelayanan perizinan	1. Memfasilitasi pelayanan sarana dan prasarana pelayanan perizinan disesuaikan dengan manajemen standar pelayanan.	Persentase sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan investasi sesuai standar	35%	55%	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Otonomi Daerah	- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan
		2. Menciptakan kepastian berinvestasi bagi pengusaha.	Persentase kegagalan investasi	0%	0%			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		3. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan investasi sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).	Kesesuaian dengan SOP	50%	90%			
25. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban umum	1. Penciptaan kepastian hukum dan ketertiban umum	1. Memfasilitasi percepatan pembuatan produk hukum regulasi perizinan dan investasi	Jumlah Perda perizinan dan investasi	12 Perda	20 Perda	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Otonomi Daerah	- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan
26. Terbangunnya infrastruktur dasar strategis	1. Pengembangan infrastruktur dasar strategis	1. Pembangunan infrastruktur dasar strategis guna meningkatkan kegiatan investasi	Jumlah Pelabuhan Udara yang beroperasi lancar	1 buah	1 buah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Bandara Silampari - Program Pemeliharaan/Rehabilitasi/Kalibrasi Fasilitas Bandara - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan - Program Pembangunan Pembangkit Listrik - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhubungan - Energi dan Sumber Daya Mineral - Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi - Dinas Pertambangan dan Energi - Dinas PU Bina Marga - Dinas PU Cipta Karya
			Persentase jumlah Desa Berlistrik	87%	100%			
			Rasio sarana dan prasarana kebinamargaan yang kondisinya baik	15%	90%			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
27. Meningkatnya kinerja koperasi, UMKM, perdagangan dan industri	1. Pemberdayaan koperasi, UMKM, perdagangan dan industri	1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.	Jumlah UKM yang diperkuat permodalannya	229 UKM	1500 UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif - Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 	- Koperasi dan UKM	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah pelaku UKM yang ditingkatkan kemampuan mengelola usahanya	0 pelaku UKM	600 pelaku UKM			
		2. Memperkuat kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang ditingkatkan kelembagaan, usaha dan permodalannya	142 koperasi	500 koperasi			
			Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh koperasi	2 pasar tradisional	7 pasar tradisional			
		3. Mengembangkan UMKM untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah / mengentaskan kemiskinan	Jumlah UMKM yang diperkuat usaha dan permodalannya	229 pelaku UMKM	1500pelaku UMKM			
			Jumlah pelaku UMKM yang ditingkatkan kemampuan mengelola usahanya	0 pelaku UMKM	600 pelaku UMKM			
			Jumlah desa tertinggal	22 desa	0 desa			
		4. Membangun koperasi yang di arahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk : (i)	Jumlah koperasi baru yang dibangun	714 koperasi	1000 koperasi			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		Peningkatan status badan hukum koperasi, (ii) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi; (iii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) kepada koperasi; (iv) meningkatkan kemandirian koperasi.	Jumlah koperasi yang meningkat klasifikasinya	A: 10, B:18,C: 20 BDK: 666	A: 68, B:70,C: 528 BDK: 334			
			Jumlah koperasi yang ditingkatkan unit usahanya dengan pola syaria'h	0 koperasi	5 koperasi			
28. Meningkatnya pariwisata dan budaya	1. Pengembangan pariwisata dan budaya	1. Mengembangkan, melestarikan, dan menggali Nilai-nilai Budaya	Jumlah situs purbakala yang dilestarikan	1 buah	4 buah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Nilai Budaya - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya - Pariwisata 	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah warisan budaya dunia yang dilestarikan	1 buah	2 buah			
		2. Mengembangkan kelembagaan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, dan agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap Karya cipta.	Jumlah seniman dan budayawan yang mendapat penghargaan seni	3 orang	15 orang			
			Jumlah kelompok / Sanggar Seni yang aktif	10 buah	54 buah			
		3. Memfasilitasi penggalian, pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya Lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana.	Jumlah sarana dan prasarana (gedung kesenian) untuk pengembangan Seni Budaya Daerah	-	1 unit			
			Jumlah Seniman yang dibina mengembangkan Seni Budaya Daerah	30 orang	150 orang			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		4. Membentuk dan mengaktifkan Kelembagaan pengembangan Budaya Lokal.	Jumlah Kelembagaan Budaya Lokal yang Aktif	3 Lembaga	21 Lembaga			
			Jumlah Hasil Budaya Masyarakat Musi Rawas yang Digali	5 Jenis	13 Jenis			
		5. Melaksanakan Explorasi Budaya dan Ekavasi Kepurbakalaan serta perkembangan Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.	Jumlah Situs Purbakala yang Dilestarikan	1 Buah	4 Buah			
		6. Pengembangan dan penataan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW).	Jumlah sarana dan prasarana ODTW yang memenuhi persyaratan	-	2 lokasi			
		7. Menggali Obyek dan Daya Tarik Kepariwisata.	Jumlah Objek Wisata yang Dapat Dikunjungi	2 Lokas	4 Lokasi			
		8. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kepariwisata.	Jumlah hotel yang dibangun di kawasan agropolitan centre	-	1 buah			
		9. Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah	Jumlah Lapangan Kerja yang Dibentuk dari Sektor Wisata	-	5 Jenis			
29. Terwujudnya jaringan pasar dan promosi, pembiayaan dan permodalan	1. Pengembangan jaringan pasar dan promosi, pembiayaan dan permodalan	1. Mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal berbasis e-government.	Jumlah website milik pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal	1	1	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	- Otonomi Daerah - Urusan Perdagangan	- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizina - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
		2. Mengembangkan jaringan pasar, pembiayaan dan permodalan.	Persentase desa yang memiliki pasar kalangan	33%	100%			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
			Persentase embrio pasar yang ditingkatkan menjadi pasar kalangan	50%	100%	- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri		
30. Meningkatnya peran BUMD	1. Peningkatan peran BUMD	1. Menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan BUMD	Persentase BUMD yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Kabupaten Musi Rawas	50%	100%	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	- Ekonomi Daerah	- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizina
31. Meningkatnya pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik	1. Reformasi birokrasi untuk menciptakan efisiensi pelayanan publik	Persentase Penduduk yang memiliki KK dan Administrasi kependudukan (Akte kelahiran, Nkah, dll)	25.35%	52,48%	- Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Pendudukan dan Catatan Sipil - Perencanaan Pembangunan	- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	71.15%	78.55%	- Program Pengembangan data/informasi		
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan	70%	80%	- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		
		2. Pengembangan sistem informasi terpadu (e-governance) yang dapat memperlancar dan meningkatkan mutu layanan	Jumlah website milik Pemerintah Daerah	1 buah	1 buah	- Program perencanaan pembangunan		

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
		3. Membangun pelayanan satu titik (one stop services), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan efektif dan efisien.	Lama Proses Administrasi Kependudukan	7 Hari	3 Hari	daerah - Program perencanaan pembangunan ekonomi - Program perencanaan sosial budaya - Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		
32. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga kemitraan	1. Penguatan lembaga kemitraan	1. Penguatan kemitraan antara industri hulu dan hilir	Frekuensi fasilitasi kemitraan antara produsen dengan eksportir	1 kali	2 kali			
		2. Membangun kemitraan dengan daerah lain yang menghasilkan komoditas yang sama dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi	Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah	15 paket	20 paket			
33. Terwujudnya pusat pemerintahan	1. Percepatan pembangunan pusat pemerintahan	1. Mempercepat penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan di Muara Beliti	Persentase penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan di Muara Beliti	80%	100%	- Program Pembanunan Pusat Perkantora	- Otonomi Daerah	- Dinas PU Cipta Karya
34. Meningkatnya efisiensi pelayanan kepada masyarakat	1. Percepatan pengembangan wilayah	1. Penataan kembali Kabupaten Musi Rawas melalui pemekaran wilayah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan	Jumlah pemekaran wilayah	1 kabupaten, 21 kecamatan, dan 277 desa/kelurahan	4 kabupaten, 40 kecamatan, dan 500 desa/kelurahan	- Pemekaran Wilayah	- Otonomi Daerah	- Bagian Tata Pemerintahan
35. Meningkatnya SDM aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur dan	1. Peningkatan dan pengembangan profesionalisme tenaga kerja	Rasio kecukupan PNS	50%	80%	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Otonomi Daerah	- Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang/ Urusan	SKPD Pennanggung Jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal (2010)	Kondisi Akhir (2015)			
	budaya kerja	2. Fasilitasi beasiswa bagi aparat untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi di dalam dan luar negeri	Rasio PNS lulusan S1/S2/S3 terhadap total PNS	0,5%.	10%	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur		Pelatihan

7.2 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas

7.2.1. Sinkronisasi Prioritas Nasional Provinsi dan Kabupaten

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam setiap musrenbang ditetapkan tema dan prioritas program. Tema Pembangunan Nasional adalah: **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya sebagai berikut :

- 1) Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
- 2) Prioritas 2 : Pendidikan,
- 3) Prioritas 3 : Kesehatan,
- 4) Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan,
- 5) Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
- 6) Prioritas 6 : Infrastruktur,
- 7) Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
- 8) Prioritas 8 : Energi,
- 9) Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10) Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik,
- 11) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Prioritas lainnya meliputi :

- 1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
- 2) Bidang Perekonomian,
- 3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Sumatera selatan yaitu : **“Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas dan Berbudaya”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Pendidikan
- 2) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- 3) Program Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Keterampilan
- 4) Program Pembangunan Pertanian
- 5) Program Pembangunan Sumberdaya Energi
- 6) Program Pembangunan Industri Pengolahan dan Manufaktur
- 7) Program Pengembangan Inovasi
- 8) Program Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan
- 9) Program Kerjasama Ekonomi dan Kelembagaan
- 10) Program Pembangunan Pemerintahan

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas yaitu : **1) Musi Rawas Bumi Agropolitan, 2) Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan 3) Musi Rawas Darussalam.**

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM masyarakat, aparatur didukung oleh program pendidikan, keagamaan dan Kesehatan
2. Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru yang didukung melalui pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, penanaman modal (investasi) koperasi dan UKM
3. Pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk pengembangan agribisnis, aparatur (pelayanan umum) dan investasi didukung oleh bidang pekerjaan umum dan perhubungan serta IPTEK
4. Mendorong dan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di dukung oleh sektor ekonomi riil, fisik, sarana dan prasarana serta budaya.

Masing-masing prioritas diimplementasikan pada Program Prioritas SKPD, Lintas SKPD dan Lintas Kewilayahan.

7.2.2. Program Prioritas SKPD

7.2.2.1. Dinas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka direncana program prioritas dan Pagu Indikatif Pendanaan bidang pendidikan selama lima tahun adalah sebagaimana disajikan pada tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Pendidikan
Tahun 2011-2015

NO	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1	Program PAUD	6235	7380	8395	10380	12263
2	Program Dikdas Dan Wajar 9 Tahun	74194	87774	98378	103324	94565
3	Program Pendidikan Menengah	52551	63501	72592	91122	101252
4	Program Pendidikan Nonformal	1523	1675	1750	1850	1950
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	625	725	830	950	1050
6	Program Pendidikan Luar Biasa	150	100	355	275	320
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.245	1.395	1.620	1.730	1.810

7.2.2.2. Dinas Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun rencana program prioritas dan pagu indikatif pendanaan sebagai mana tabel 7.3

Tabel 7.3
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Kesehatan
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program obat dan Perbekalan Kesehatan	7.640,474	8.192,500	8.702,125	9.212,231	9.722,842
2	Program pengawasan obat dan makanan	294.371	365.337	385.940	406.487	438.461
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.814,236	5.201,245	5.322,092	5.672,408	5.596,589
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	82.227	90.449	99.494	109.444	120.338
5	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	595.913	645.413	657.766	671.375	678.828
6	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	18.391,924	11.102,00	12.025,00	12.321,00	13.903,00
7	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit mata	7.763.946	0	0	0	0

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
8	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1323,006	0	0	0	0
9	Program perbaikan gizi masyarakat	1.827,275	1.955,292	1.975,707	2.031,429	3.507,655
10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.407,267	1.204,050	1.279,660	1.368,550	1.427,081
11	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	66.199	69.509	72.984	76.633	80.465
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	42.887	68.131	71.420	74.991	78.731
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	200.925	210.971	221.519	232.596	244.225
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	578.308	566.788	597.569	631.669	666.280
15	Program pengembangan data / informasi	1.218,855	908.762	948.046	985.067	1.499,950
16	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1.604,035	1.650,000	1.950,000	2.131,000	2.200,000
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	350.000	0	0	0	0

7.2.2.3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Infrastruktur yang akan menjadi perhatian dalam Bab ini, adalah prasarana/sarana jalan; prasarana perhubungan, yang meliputi angkutan darat, perkeretaapian, dan angkutan sungai.

Untuk meningkatkan kinerja pencapaian sasaran Dinas PU Bina Marga dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disusun prioritas program dengan pendanaan sebagaimana tabel 7.4

Tabel 7.4
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas PU Bina Marga
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	165.213	175.913	211.713	181.380	168.780
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	274.200	267.000	267.000	257.000	257.000
4	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	200	200	220	220	220
5	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	-	-	600	-	-
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	1.050	3.050	3.050	2.550	50

7.2.2.4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan prioritas program sebagaimana tabel 7.5

Tabel 7.5
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas PU Pengairan
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & jaringan Pengairan Lainnya	5.000	5.500	6.000	6.4000	6.600
2	Program Pengendalian Banjir	2.200	2.400	2.600	2.700	2.800
3	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Program Pengembangan, Pengolahan dan Konservasi Sungai, Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	2.000	2.200	2.400	2.600	-
5	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limba	-	1.000	1.000	1.000	1.000

7.2.2.5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Hal yang paling mendasar dalam bidang Tata Ruang di Kabupaten Musi Rawas adalah belum tersedianya payung hukum yang memadai tentang Tata Ruang. Peraturan perundangan yang ada menyangkut tata ruang masih dalam proses penyelesaian yaitu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 – 2028. Sebagai konsekwensi keterbatasan payung hukum tersebut, maka pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Musi Rawas sering dilakukan tanpa mengikuti kaidah tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam.

Untuk mencapai sasaran dalam lima tahun ke depan ditetapkan prioritas program dan Pagu Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 7.6
Pagu Indikatif PU Cipta Karya dan Tata Ruang 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	600	2.100	560	-	-
4	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.515	3.600	6.000	5.000	1.000
5	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	13,979	15.875	12,050	16,975	17,600
6	Program Pembangunan Perumahan	-	7.110	4.251	-	-
7	Program Perencanaan Tata Ruang	875	975	700	700	700
8	Program Pemanfaatan Ruang	-	75	575	75	75
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100	100	150	150	100
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.002	2.935	1.000	3.250	-
12	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	-	8.007,5	3.350	-	-

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
13	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	-	1.000	1.000	1.000

7.2.2.6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan merupakan dapur perencanaan yang sangat strategis, Bappeda sebagai institusi perencanaan memadukan perencanaan mikro dengan makro.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun prioritas program dan pagu pendanaan sebagai berikut:

Tabel 7.7
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Bappeda
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan data/informasi	1.893	740	795	850	930
2	Program Kerjasama Pembangunan	-	1.500	-	2.000	2.500
3	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	-	6.200	6.500	6.700	7.000
4	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	500	-	600	700
6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	110	110	110	110	110
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.210	870	930	990	1.710
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.290	700	775	775	1.300
9	Program Perencanaan Sosial Budaya	638	650	775	850	1.000
10	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	1.125	1.175	-	1.275
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	-	500	500	500	500

7.2.2.7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut di atas ditetapkan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 7.8

Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	85	110	110	110	110
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	-	15	15	15	15
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.563	853	220	221	227
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	5.500	550	600	675	725
5	Program Peningkatan dan Penanganan Lalu Lintas	490	460	470	460	460
6	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	10	1.870	2.010	2.515	15
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	197.761	225.030	119.032	162.035	148.038
8	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	500	500	-	-
9	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	78	90	-	90	-
10	Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	104	255	355	390	480
11	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Sungai dan Kereta Api	10.000	20.000	40.000	20.0000	30.000
12	Program Pengembangan Bandara Silampari	34.950	40.475	20.350	17.300	15.525
13	Program Pemeliharaan/Rehabilitasi/Kalibrasi Fasilitas Bandara	11.770	2.195	1.845	2.195	2.045

7.2.2.8. Badan Lingkungan Hidup Daerah

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2011 - 2015).

Untuk mencapai sasaran ditetapkan disusun prioritas program dan pagu pendanaan sebagai berikut :

Tabel 7.9
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	500	550	600	650	650
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.485	3.546	2.672	2.953	3.247
3	Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	1.000	-	1.000	1.000	1.000
4.	Program Rehabilitas dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	500	550	600	650	700
5	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	479	910	510	516	210
6.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	200	-	355	380	410
7	Program Pen gendalian Kebakaran Hutan	300	350	370	390	350
8	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	850	720	350	685	745

7.2.2.9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk mencapai sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ditetapkan prioritas program sebagai berikut :

Tabel 7.10
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.925	6.450	6.225	5.700	5.000

7.2.2.10. Kantor Pemberdayaan Perempuan

Untuk mendukung penacapaian sasaran dirumuskan program sebagai berikut:

Tabel 7.11
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Kantor Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	200	225	250	300	300
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	468	475	480	450	450
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.353	1.350	1.355	1.360	1.365
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	150	175	185	195	200

7.2.2.11. Badan Keluarga Berencana

Untuk mendukung pencapaian sasaran Badan Keluarga Berencana dirumuskan program sebagai berikut:

Tabel 7.12
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Badan Keluarga Berencana
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Keluarga Berencana	390	391	392	393	394
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	89,5	93,5	97,5	101,5	105,5
3	Program pelayanan kontrasepsi	2.124	2.139	2.173	2.187	2.220
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	2.113	2.123	2.126	2.187	2.223
5	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	21	23	25	27	29
6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	125	125	125	125	125
7	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	28	29	30	31	32

8	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	90	80	80	80	80
9	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	91	89	89	89	89
10	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	29	28	28	28	28

7.2.2.12. Dinas Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan perdesaan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut di atas, dirumuskan program sebagai berikut:

Tabel 7.13
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Sosial
Tahun 2011 – 2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2.000	6.949	6.730	6.630	6.580
2	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.250	2.250	3.250	2.250	2.250
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	1.000	1.750	1.250	750	250
4	Program Pembinaan para Penyandang cacat dan trauma	1.000	1.689	1.689	1.689	1.788
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	11.032	2.115	1.808	2.049	2.410
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	450	460	450	460	460
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.500	2.046	1.466	1.396	1.396

7.2.2.13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Disusun program prioritas sebagaimana dalam tabel 7.14.

Tabel 7.14
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.750	9.874	4.855	1.550	2.250
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	630	725	800	890	1.010
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		200	200	300	200
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	9.339	2.760	2.745	2.510	1.431
5	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh / KTM	5.800	1.200	775	250	200

7.2.2.14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut pada tabel 7.15.

Tabel 7.15
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	1.253,90	1.153,90	310	310	310
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	400	400	400	400	400
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	670	670	670	570	470
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.618,50	1.500	1.300	1.300	1.300
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	200	200	200	-
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	200	200	200	-

7.2.2.15. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan, disusun program sebagaimana pada tabel 7.16.

Tabel 7.16

Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.085	1.470	1.640	1.660	1.855
02	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.750	1.230	1.870	1.700	1.860
03	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	200	200	200	200

7.2.2.16. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, disusun program sebagai berikut :

Tabel 7.17

Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	295	980	340	1085	295
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	375	480	585	675	625
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1820	1440	2215	1550	2460
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	200	-	475	275
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1650	1850	1970	1930	2170
6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	300	300	300	300	-
7	Program Pengembangan Kemitraan	200	200	100	-	-

7.2.2.17. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pemuda dan Olah Raga, disusun program sebagai berikut :

Tabel 7.18
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	95	105	115	126	139
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.078	1.186	1.304	1.435	1.578
3	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	200	220	242	266	293
4	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	-	-	180	198	218
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	-	-	445	490	538
6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.510	2.627	2.890	3.179	3.497
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	366	403	443	487	536

7.2.2.18. Badan Kesbangpol dan Linmas

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Badan Kesbangpol dan Linmas, disusun program sebagai berikut :

Tabel 7.19
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	1.887	1.905	2.095	2.359	2.460
2	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	500	500	550	550	600
3	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	835	750	780	905	825
4	Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	375	375	345	345	325
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	750	615	1.190	1.405	1.245
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam	545	545	545	545	545

7.2.2.19. Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program sebagai berikut :

Tabel 7.20
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2011-2015

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan keamanan dan Kenyamanan lingkungan	700	950	700	650	650
2	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350

7.2.2.20. Sekretariat Daerah

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.21
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Daerah
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Administrasi Bidang Ekonomi	600	700	850	950	900
2	Program Administrasi Bidang Tata Pemerintahan	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
3	Program Administrasi Bidang Protokol	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
4	Program Administrasi Bidang Perlengkapan	11.500	11.500	11.800	11.800	11.800
5	Program Administrasi Bidang Organisasi	1.757	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Program Administrasi Bidang Kesra	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
7	Program Administrasi Bidang Keuangan	5.935	5.950	5.950	5.980	5.980
8	Program Administrasi Bidang Hukum	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
9	Program Administrasi Bidang Pembangunan	1.975	1.280	1.345	1.350	1.415
10	Program Administrasi Bidang Humas	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
11	Program Administrasi Bidang Umum	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
12	Prgram Pengembangan Wilayah Perbatasan	700	850	950	950	950
13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	450	450	450	450	375
14	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Prosedur Kerja	550	550	700	450	450
15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	250	250	150	100	75
16	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	300	200	200	200	250
17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	450	450	500	550	650
18	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	1700	1700	1700	1700	1700
19	Program Penatagunaan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah	4100	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	500	500	400	-	-
21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65	65	65	65	65
22	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	994	-	-	-	500
23	Program Kerjasama Pembangunan	200	200	225	250	275
24	Program Pengembangan Data/Informasi	90	-	-	-	-

7.2.2.21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.22
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Sekertariat Dewan
Tahun 2011-2016

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.000	13.000	10.000	9.000	8.000
2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	12.000	7.000	6.000	5.000	5.000

7.2.2.22. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disusun program :

Tabel 7.23
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset
Daerah Tahun 2011-2016

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Juta Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	575	575	650	650	725
2	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.655	5.380	7.605	5.880	5.880
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	500	500	560	600	650

7.2.2.23. Inspektorat

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.24
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Tahun 2011-2016

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan System Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.935	4.106	4.251	4.431	4.592
2	Program Peningkatan Profesionalitas Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	500	525	550	580	600
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	575	165	170	175	185
4	Program Mengintensifkan Penangan	300	300	325	330	360

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Pengaduan Masyarakat					

7.2.2.24. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.25
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2011-2015

NO	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pendidikan Kedinasan	1.990	1.990	1.940	1.940	1.990
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	3.800	3.055	2.450	2.050	2.450
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.225	3.195	3.510	3.250	3.570

7.2.2.25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 7.26
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Tahun 2011-2015

No	Program prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program peningkatan keberdayaan masy. Desa	930	1.280	1.355	730	755
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	470	525	575	650	670
3	Program Peningkatan partisipasi masy. Dalam membangun Desa	258	258	258	258	258
4	Program peningkatan kapasitas aparatur Pemdes	725	1.075	725	1.075	725
5	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	-	300	300	300	300
6	Program penguatan bidang penanggulangan kemiskinan	3.825	3.600	3.600	3.600	3.950

7.2.2.26. Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.27

Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	763	1.200	1.379	1.499	1.533
2	Program Perbaikan sistem administrasi Kearsipan dan Dokumentasi	229	235	248	253	267
3	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	200	220	240	260
4	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Saran dan Prasarana Kearsipan	-	100	110	120	130
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-	200	220	240	260

7.2.2.27. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel 7.28.

Tabel 7.28

Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011-2015

No	Program prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	400	500	750	1.000	1.250
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.790	2.300	2.550	2.975	3.400
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	300	500	600	750	1.050
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.400	1.300	1.050	1.050	1.050
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	6.250	6.800	7.350	7.900	8.450
6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	450	475	500	525	550
7.	Program Peningkatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan	445	500	600	700	800
8	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	4.302,400	5.000	6.000	6.300	7.000
9	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan	625	700	800	900	1000
10	Program peningkatan Nilai tambah, daya	400	500	600	700	800

No	Program prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
	saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian					

7.2.2.28. Dinas Perkebunan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.29
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Perkebunan
Tahun 2011-2015

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program peningkatan kesejahteraan petani	1.435	1.535	1.635	1.735	1.835
2	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan	10.435	11.535	11.635	11.735	11.835
3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	950	1005	1060	1090	1120
4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	6520	4152	7114	3506	3633
5	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	5450	5500	5550	5600	5650

7.2.2.29. Dinas Peternakan dan Perikanan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 7.30
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun 2011-2015

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pengembangan Budi Daya Perikanan	3.770	4.020	4.540	5.030	5.490
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	600	650	700	800	850
3	Program Pengembangan Kawasan Budi Daya Laut / Air Payau dan Air Tawar	75	75	75	-	-
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	6.750	7.800	8.025	8.475	9.300
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	50	50	50	50	50
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	725	775	875	935	995
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	420	300	530	360	640
8	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	140	150	160	170	180
9.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	740	785	805	850	870
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	40	75	100	125	150
11	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	50	50	100	125	150

12	Program Pendampingan Tugas Pembantuan	100	100	120	130	140
13	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)	425	750	775	1175	1075
14	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (APBN)	65	65	65	65	65
15	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (APBN)	3.250	3.050	3.125	3.075	4.075
16	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (APBN)	500	500	500	500	500
17	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (APBN)	15	15	15	15	15
18	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (APBN)	50	50	50	50	50
19	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Asuh (APBN)	2.325	2.525	2.525	2.525	2.525
20	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (APBN)	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

7.2.2.30. Badan Ketahanan Pangan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.31
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Kantor Ketahanan Pangan
Tahun 2011-2015

NO	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3.961	8.225	10.372	10.807	11.017

7.2.2.31. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.32
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011-2015

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.353	1.370	1.376	1.380	1.385
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	490	500	525	525	525
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	193	500	500	500	500
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	2.311	2.372	2.678	1.789	1.842
5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	2.688	2.720	2.760	2.800	2.800
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	321,6	325	325	325	325

No	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	140	140	140	140	140
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	83	100	100	100	100
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	180	180	180	180	180

7.2.2.32. Dinas Kehutanan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.33
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Kehutanan
Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	494,65	1.230	1.370	1.510	1.650
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.702,94	2195	2350	2580	3170
3	Program Perlindungan dan Konservasi SDH	324,23	850,00	900,00	950,00	1015,0
4	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	642,9	1380	1605	1852	2165

7.2.2.33. Dinas Pertambangan dan Energi

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel 7.34 berikut.

Tabel 7.34
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pembinaan dan Pengawasan	210	300	300	300	300
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Dan Energi	675	685	795	800	720
3	Program Pengawasan dan Pengendalian Produksi	100	100	125	125	150
4	Program Percepatan Produksi Migas dan Pengelolaan Sumur Tua	150	100	125	125	125
3	Program Penyediaan Infrastruktur penunjang Kegiatan Pertambangan	700	100	100	200	200
6	Program Peningkatan Penerimaan Daerah	350	350	350	350	350
7	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	700	100	100	225	250
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	30.428	39.116	34.280	28.636	9.062
9	Program Pembangunan Pembangkit Listrik :	200	750	250	250	250

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
10	Program Pengembangan Energi Alternatif :	2.860	6.480	1.385	430	330
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air :	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

7.2.2.34. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.35
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	725	750	750	750	750
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	400	600	500	600	600
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.025	3.025	2.730	1.980	1.230
4	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan					
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	350,00	550,00	550,00	550,00	350,00
6	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar di Agropolitan Centre dan Agropolitan District	325	1.100	425	225	200
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	600	580	1.000	400	400
8	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	200	200	200	200	200
9	Program Penataan Struktur Industri	200	200	200	200	200
10	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	275	225	275	300	300

7.2.2.35. Rumah Sakit dr. Sobirin

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.36
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan RS dr. Sobirin Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.765	3.036	3.271	3.598	3.700
2	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	55	65	65	70	70
3	Program Pengembangan lingkungan sehat	138	0	0	0	0
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	590	685	798	1.023	870
5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	265	280	285	299	311
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan	400	50	100	100	100

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prasarana Rumah Sakit					
7	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	310	310	310	310	310
8	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	174	174	174	174	0,00
9	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000

7.2.2.36. Rumah Sakit Rupit

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.37
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan RSUD Rupit
Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	200	200	200	200
2	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	-	50	50	50	50
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100	150	200	250	300
5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100	125	150	175	200
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	6.500	6.000	-	-
7	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	300	100	100	100
8	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	50	50	50	50	50

